

OPTIMALISASI PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI DI LABUHANBADAS KABUPATEN SUMBAWA

Elly Karmeli¹, Vivin Fitryani², Eka Warokah³

1. *Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa*

2. *Keuangan Perbankan, Universitas Samawa*

3. *Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa*

Email :

ellykarmeli@universitas-samawa.ac.id,

vivinfitryani@universitas-samawa.ac.id

Abstrak

This study was conducted with the aim to know the optimization of subsidized fertilizers supervision in Labuhan Badas Sub-district, Sumbawa District. Type of this study was descriptive. Type of data used was qualitative that have got through interview. The informant in this study were Head of the Agriculture Office, the head of KP3, the supervisor of the subsidized fertilizer, the agent of the distribution of subsidized fertilizers and the farmers or farmer groups which consisted of 2 people. Data analysis was done using qualitative data analysis techniques of Miles and Huberman which included data collection, data reduction, data presentation and conclusion / verification. The findings of this study showed that the distribution of fertilizers in Labuhan Badas Sub-district, Sumbawa District was in line with the process that have determined by government through the decision of the Sumbawa Regent. Optimization of distribution subsidized fertilizers supervision by KP3 in Labuhan Badas Sub-district, Sumbawa District consisted of supervision procedures and fertilizer distribution mechanisms, supervision flexibility, accuracy of distribution and modes of distorting the distribution. However, improvements were needed in the supervision procedure, namely the determination of measuring instruments, assessing, guidance to retailers and farmer groups, and evaluation of the distribution which is routinely implemented every year.

Keywords: *Optimization, Supervision, Distribution, Subsidized Fertilizer.*

PENDAHULUAN

Pupuk merupakan salah satu kebutuhan terpenting bagi petani untuk membantu meningkatkan produktifitas pertanian mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk dan menjaga kesejahteraan petani, menteri perindustrian dan perdagangan mengambil kebijakan dengan mengadakan dan mendistribusikan pupuk bersubsidi. Pupuk yang diterapkan sebagai pupuk bersubsidi adalah pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan organik.

Harga pupuk mahal dan ketersediaan pupuk langka selalu menjadi permasalahan bagi petani setiap puncak musim tanam, dan kejadian ini menjadi berita utama diberbagai daerah. Pemerintah memfasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian guna menjamin ketersediaan pupuk sesuai dengan harga eceran (HET) yang telah ditetapkan, sehingga petani dapat menerapkan pemupukan berimbang guna mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani yang lebih baik.

Pelaksanaan program pupuk bersubsidi masih ditemukan penyimpangan, seperti ketika pendataan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), penjualan pupuk bersubsidi kepada yang tidak berhak, penghitungan volume penyaluran, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, penghitungan subsidi pupuk, dan pengawasan program pupuk bersubsidi.

Penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan program pupuk bersubsidi sebagian besar terjadi di tingkat pengecer, distributor dan produsen serta lemahnya mekanisme pengawasan pelaksanaan pupuk bersubsidi. Sebagian besar regulasi telah mengatur mekanisme pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi secara memadai, namun penyimpangan masih terjadi karena pelaksanaannya masih belum berjalan sesuai ketentuan, lemahnya pengawasan dari institusi yang berwenang, dan lemahnya kontrol masyarakat luas.

Pengawasan yang efektif harus dilakukan pada aspek distribusi pupuk bersubsidi, karena sistem distribusi pupuk bersubsidi memiliki alur yang panjang dan berpotensi terhadap terciptanya berbagai penyimpangan. Pemerintah melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) memiliki kewenangan dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, baik ditingkat provinsi atau ditingkat kabupaten/kota. KP3 adalah salah satu wadah koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida antar instansi terkait bidang pupuk dan pestisida yang memiliki tugas dan tanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pupuk dan pestisida diwilayah masing-masing.

Pengawasan berperan penting dalam pelaksanaan program pemerintah, karena pengawasan dapat mengusahakan apa yang telah direncanakan menjadi kenyataan (Manullang, 2004). Dengan adanya pengawasan, proses pencapaian tujuan program pemerintah yang diimplementasikan dapat tercapai dengan baik, serta dapat diambil tindakan korektif jika dalam pelaksanaannya terdapat berbagai penyimpangan yang muncul. Sebagai fungsi manajemen yang penting, maka pengawasan yang efektif akan memiliki dampak besar terhadap pencapaian tujuan program.

Fenomena yang terjadi di Labuan Badas Kabupaten Sumbawa saat ini adalah mengenai kelangkaan Pupuk. Kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut telah memperlihatkan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap distribusi pupuk bersubsidi belum dapat berjalan maksimal, sehingga ketersediaan/stok pupuk bersubsidi yang semula diperkirakan akan terpenuhi hingga akhir tahun menjadi tidak dapat terpenuhi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul Optimalisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi di Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa.

KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Pengawasan

Menurut Robbins dan Coulter (2005), pengawasan merupakan proses pemantauan aktivitas organisasi untuk memastikan apakah aktivitas sesuai dengan yang direncanakan dan sebagai proses mengoreksi setiap penyimpangan yang muncul. Pernyataan senada oleh Handoko (2009), bahwa pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Pengawasan dilakukan dengan tujuan (Sukarna, 1993):

1. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan lancar atau tidak.
2. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang serupa atau timbulnya kesalahan baru.
3. Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam *planning* terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah ditentukan.
4. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya telah sesuai dengan program seperti yang telah ditetapkan dalam *planning* atau tidak.
5. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan membandingkan dengan apa yang telah ditetapkan dalam rencana (standar).
6. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Suatu sistem pengawasan dapat efektif merupakan indikator terpenting dalam tercapainya pengawasan yang baik. Efektivitas dapat dicapai ketika suatu organisasi memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan dengan baik. Manullang (2004), mengemukakan bahwa suatu sistem pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip berikut:

1. Adanya rencana tertentu dalam pengawasan, dengan adanya rencana yang matang akan merupakan standar atau alat pengukur terhadap berhasil tidaknya pengawasan.
2. Dapat merefleksikan berbagai sifat dan kebutuhan dari berbagai kegiatan yang diawasi.
3. Dapat segera dilaporkan adanya berbagai bentuk penyimpangan.
4. Pengawasan harus bersifat fleksibel, dinamis dan ekonomis.
5. Dapat merefleksikan pola organisasi.
6. Dapat menjamin diberlakukannya tindakan korektif yakni segera mengetahui apa yang salah, dimana terjadinya kesalahan tersebut, serta siapa yang bertanggung jawab.

Tinjauan Tentang Pengawasan Pupuk Bersubsidi

Subsidi pupuk dilakukan untuk membantu meringankan beban petani dalam membiayai usaha taninya. Selain persoalan biaya, petani juga memang menghadapi persoalan kemampuan dalam mengadopsi teknologi pemupukan untuk peningkatan produktivitas. Sehingga diperlukan terobosan program untuk mengatasi hal ini sebagai upaya peningkatan komoditas pertanian untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian melalui teknologi pemupukan adalah program pupuk bersubsidi. Program ini secara filosofis menjadi bagian upaya negara untuk pemenuhan hak atas pekerjaan warga yang layak sebagaimana tertulis dalam Konstitusi maupun undang-undang.

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian mewajibkan kepada produsen untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Aspek-aspek yang harus diawasi mencakup pengadaan dan penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran.

Pada lembaga pemerintahan, tugas dan tanggungjawab pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi dilakukan oleh komisi pengawas pupuk dan pestisida (KP3). Dalam melaksanakan tugasnya, KP3 dibantu oleh penyuluh. Pengawasan menjadi hal yang sangat penting guna menjamin tidak terjadinya penyimpangan.

Menurut Sudjono (2011), kelangkaan pupuk di tingkat petani bukan karena kurangnya produksi, akan tetapi lebih dikarenakan lemahnya sistem distribusi. Modus-modus yang kerap terjadi dalam distribusi pupuk bersubsidi, seperti penyelundupan pupuk ke luar negeri, perembesan pupuk dari pasar subsidi ke non subsidi, lonjakan harga di tingkat kios diatas HET (Harga Eceran Tertinggi), perembesan antar wilayah. Modus-modus penyimpangan tersebut merupakan suatu tindakan yang harus segera dihentikan melalui mekanisme pengawasan yang efektif.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Nazir (2011), penelitian deskriptif adalah pencarian fakta interpretasi yang tepat. Desain deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari permasalahan terkait pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi di Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa untuk selanjutnya mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang berupa kata-kata dan dianalisis menggunakan metode non statistik (Sugiyono, 2016). Data kualitatif dalam penelitian ini merupakan jawaban informan penelitian terhadap wawancara yang diberikan. Informan penelitian ini berjumlah 5 orang yang dianggap mengetahui terkait permasalahan yang terjadi, yaitu ketua KP3, pengawas pupuk bersubsidi, petani/kelompok tani, kepala dinas pertanian, dan agen penyalur/pendistribusian pupuk bersubsidi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dengan narasumber yang mengetahui dan memahami lebih jauh (Arikunto, 2013). Wawancara dilakukan dengan membawa panduan wawancara yang berisi sederet pertanyaan lengkap dan terperinci.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan arsip yang sudah ada (Sugiyono, 2016). Data yang dikumpulkan menggunakan teknik ini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai kegiatan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh KP3.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992), yang mencakup *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Efektivitas Pengawasan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

1. Prosedur Pengawasan dan Mekanisme Pengawasan

Prosedur untuk memperoleh pupuk bersubsidi adalah memiliki rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK), permintaan terhadap pupuk bersubsidi hanya bisa diterima jika ada RDKK. Penerapan sistem itulah yang dianggap sejumlah petani menjadi kelangkaan pupuk. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Hendra Gunawan, S.H, Direktur kantor pupuk Labuhan Badas:

“Pengawasan dan mekanisme pendistribusian pupuk di wilayah Sumbawa khusus untuk pengawasan dan penyaluran pupuk urea bersubsidi, diberikan langsung pada pihak pengecer dan disusun rapid dan kami sangat terbantu dengan adanya pengawasan yang dilakukan KSP. Sebelum kami melakukan distribusi kami melakukan pendataan RDKK masing-masing wilayah, jadi kita menyalurkan sesuai data RDKK dari pengecer”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun permasalahannya adalah prosedur dan mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi belum dipahami oleh para petani di desa. Para petani harus diberikan pemahaman terkait prosedur pengawasan pupuk bersubsidi dan juga cara mendapatkan pupuk bersubsidi di Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa.

2. Ketetapan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

Ketetapan yang berlaku dalam pendistribusian pupuk bersubsidi ini adalah tidak semua petani berhak membeli pupuk subsidi, hanya petani yang tercantum dalam data RDKK yang berhak membeli pupuk subsidi. Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Gusti Ketut Budiana, penjual eceran pupuk:

“RDKK ditentukan kelompok tani, petugas penyuluh lapangan (PPL) dan diakomodir aparat desa setempat. Secara berjenjang disampaikan ke kota/kabupaten, provinsi dan Kementerian Pertanian menjadi RDKK penerima pupuk subsidi”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap penerima pupuk bersubsidi di Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan dengan baik, sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Modus-Modus Penyimpangan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Modus penyimpangan dalam pupuk bersubsidi yang terjadi di Labuan Badas Kabupaten Sumbawa dilakukan melalui penggantian karung pupuk bersubsidi menjadi pupuk Non-bersubsidi, pengurangan berat timbangan pupuk bersubsidi, serta melakukan pencampuran pupuk bersubsidi dengan zat tertentu. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpangan pupuk bersubsidi adalah oknum distributor dan pengecer tidak resmi, serta oknum distributor resmi. Modus-modus penyimpangan tersebut terjadi karena tidak efektifnya mekanisme pengawasan.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Hendra Gunawan, S.H, Direktur dikantor pupuk Labuan Badas:

“Yang terjadi antara lain penimbunan stok, kemasan pupuk bersubsidi diganti, penyebaran isu kelangkaan pupuk dan pemalsuan kuota kebutuhan pupuk”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat modus penyimpangan terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi di Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa. Hal ini menandakan lemahnya pengawasan yang dilakukan. Upaya untuk menghindari hal tersebut, maka pengawasan harus ditingkatkan.

Faktor Penghambat Pengawasan Distribusian Pupuk Bersubsidi

1. Sarana dan Prasarana dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pupuk adalah faktor produksi yang sangat strategis bagi petani terutama dalam peningkatan produktifitas dan mutu hasil komoditas pertanian. Oleh karena itu, petani harus memperoleh pupuk dalam tepat waktu dan tepat jumlah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Bapak ABD Rahmad, penjual eceran pupuk:

“Sering terjadi penyimpangan seperti keterlambatan, stoknya yang kurang dan tidak sesuai dengan RDKK karena RDKK”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa banyak terjadi penyimpangan pada proses pendistribusian pupuk bersubsidi ke petani, seperti keterlambatan dan jumlah yang diterima tidak sesuai RDKK. Akibatnya, petani beralih membeli pupuk non subsidi dengan harga lebih mahal sehingga berdampak pada meningkatnya biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani.

2. Kebijakan dan Proses Administrasi yang Lemah

Kebijakan subsidi pupuk yang dimaksud untuk membantu petani dalam pengadaan dan penyediaan pupuk dalam usaha tani agar dapat menerapkan pupuk berimbang sesuai kondisi fisik lokasi, sehingga memperoleh hasil pertanian yang optimal.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Hendra Gunawan, S.H, Direktur dikantor pupuk Labuan Badas:

“Administrasinya pupuk besubsidi itu sudah di tetapkan dalam SPJB antar produsen dan distributor, namun kenyataannya ada beberapa petani yang dengan sengaja memark up luas lahannya sehingga hal itu berdampak pada petani lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa banyak ditemukan data RDKK yang tidak valid, terjadi pengelembungan (*mark up*) luas lahan dengan jumlah petani, penjualan pupuk dengan harga diatas HET, keterlambatan distribusi, penjualan di luar wilayah distribusi, dan terdapat pengecer yang tidak resmi. Keseluruhan permasalahan dapat terjadi dikarenakan lemahnya proses administrasi.

Pembahasan

Pupuk merupakan salah satu kebutuhan terpenting bagi petani untuk membantu meningkatkan produktifitas pertanian mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Pemerintah melalui kementerian perindustrian dan perdagangan mengambil kebijakan dengan mengadakan dan mendistribusikan pupuk bersubsidi. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan pupuk untuk para petani yang dapat diperoleh dengan harga murah.

Manfaat dari kebijakan pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi ini sangat dirasakan oleh masyarakat petani, tak terkecuali masyarakat petani di Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa. Namun, kenyataan dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi masih ditemukan penyimpangan, seperti ketika pendataan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), penjualan pupuk bersubsidi kepada yang tidak berhak, penghitungan volume penyaluran, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, penghitungan subsidi pupuk, dan pengawasan program pupuk bersubsidi.

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat terjadi karena pengawasan yang dilakukan terhadap distribusi pupuk bersubsidi belum dapat berjalan maksimal, sehingga pendistribusiannya tidak tepat sasaran dan ketersediaan/stok pupuk bersubsidi yang semula diperkirakan akan terpenuhi menjadi tidak dapat terpenuhi.

Menurut Manullang (2004), pengawasan berperan penting dalam pelaksanaan program pemerintah, karena pengawasan dapat mengusahakan apa yang telah direncanakan menjadi kenyataan Dengan adanya pengawasan, proses pencapaian tujuan program pemerintah yang diimplementasikan dapat tercapai dengan baik, serta dapat diambil tindakan korektif jika dalam pelaksanaannya terdapat berbagai penyimpangan yang muncul. Sebagai fungsi manajemen yang penting, maka pengawasan yang efektif akan memiliki dampak besar terhadap pencapaian tujuan program.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan, maka peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan penyaluran pupuk di Labuan Badas Kabupaten Sumbawa telah sesuai dengan alur seperti yang ditetapkan Pemerintah melalui Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 289 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Komisi Pengawas Pupuk dan Pesticida di Labuan Badas Kabupaten Sumbawa. Namun, dalam hal prosedur pengawasan masih perlu adanya perbaikan, yaitu penetapan alat ukur, menilai, mengadakan tindakan yang diwujudkan dalam bentuk koordinasi diantara pengawas dan distributor, pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi, pembinaan kepada pengecer dan kelompok tani dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, serta adanya evaluasi pendistribusian pupuk bersubsidi yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti mengemukakan rekomendasi, yaitu untuk menciptakan efisiensi pada pendistribusian pupuk bersubsidi sehingga tercapainya harga optimal (di bawah atau sama dengan HET), komisi pengawas pupuk dan pestisida (KP3) di Labuan Badas Kabupaten Sumbawa hendaknya meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi secara lebih intersif dengan cara turun langsung ke lapangan guna memantau pelaksanaan penyaluran pupuk, khususnya dalam hal ketetapan waktunya penyaluran dan kesesuaian Harga Eceran Tertinggi bagi petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Handoko, T. Hani. 2009. *manajemen sumber daya manusia* “, Cetakan IX jilid I Yogyakarta: BPFE UGM.
- Manullang, M. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI-Press.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 130 tahun 2014 Tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk dektor pertanian tahun anggaran 2015.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 15/M/-DAG Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015.
- Robbins, Stephen P dan Coulter, Mary. 2005. *Manajemen, Edisi Ketujuh, Jilid 2*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 8 No 3, Desember 2020

Sudjono, Spudnik. 2011. *Sistem Distribusi Berbasis Relationship*. Jakarta: Direktorat Jendral Pertanian.

Sukarna. 1993. *Teknik Pengawasan Pegawai*. Jakarta: Jaya Sakti.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.